JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 6 No. 1, 2023, hal 171-180 ISSN 2746-3249

Peranan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Dwi Putri Cesaria Aminellia*, Muzdalifah
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* dwi.aminellia@gmail.com

Abstract

This study determines the role of balancing and profit-sharing funds for economic growth and a general allocation of funds for economic inequality. This study uses a scatter plot analysis of Klassen Typology in thirteen districts/cities in South Kalimantan from 2011-2019. The Klassen Typology here is divided into three years of observation. Two thousand eleven as a base year, 2015 as a middle year, and 2019 as a final year of observation. The observations are divided into balancing and profit-sharing funds for economic growth and general allocation funds for economic inequality. The secondary data used are from the Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, which consists of data on the rate of economic growth and Gini Ratio, and from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan used of balancing funds, profit sharing funds, and general allocation funds data.

The Klassen Typology with the best results for balancing funds on economic growth is in quadrant II, with low balancing funds and high for economic growth. The regions that have improved economic growth are Banjar, Balangan, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, and Tabalong; there are so many being in quadrant II, both in 2011-2019. The role of profit-sharing funds on economic growth is in quadrant I as the best result with high profit-sharing funds and high economic growth. Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, and Hulu Sungai Utara have improved their economic growth over three years of comparison. The role of general allocation funds in economic inequality is in quadrant III for the best with high general allocation funds and low economic inequality. The regions with economic inequality decreased are Balangan, Barito Kuala, Tapin, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, and Hulu Sungai Utara.

Keywords*: Klassen Typology; Balancing Fund; Economic Growth; Economic Inequality*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi serta dana alokasi umum terhadap kesenjangan ekonomi. Menggunakan *scatter plot* analisis Tipologi Klassen pada tigabelas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2011-2019. Analisis Tipologi Klassen pada penelitian ini dibagi dalam tiga tahun pengamatan yaitu tahun 2011 sebagai tahun dasar pengamatan, tahun 2015 sebagai tahun tengah pengamatan dan tahun 2019 sebagai tahun akhir pengamatan. Pembagian pengamatan yang digunakan adalah dana perimbangan dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum terhadap kesenjangan ekonomi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan yang terdiri dari data laju pertumbuhan ekonomi dan *Gini Ratio*, serta dari Direktorat Jenderal Perimbangan berupa data dana perimbangan, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Hasil analisis Tipologi Klassen dengan hasil terbaik untuk peran dana perimbangan terhadap partumbuhan ekonomi berada pada kuadran II, dengan dana perimbangan yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi membaik yaitu Kabupaten Banjar, Balangan, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tabalong, dengan banyak berada pada kuadran II baik pada 2011, 2015 dan 2019. Peran dana

bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi berada pada kuadran I sebagai hasil terbaik yaitu dana bagi hasil yang tinggi juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi membaik selama tiga tahun perbandingan adalah Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Peran dana alokasi umum terhadap kesenjangan ekonomi berada pada kuadran III, dengan dana alokasi umum yang tinggi dan kesenjangan ekonomi yang rendah. Daerah dengan kesenjangan ekonomi menurun adalah Kabupaten Balangan, Barito Kuala, Tapin, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu sungai Utara.
Kata Kunci: Tipologi Klassen; Dana Perimbangan; Pertumbuhan Ekonomi; Kesenjangan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur daerahnya, hal ini dimulai pada tahun 2001 yang mana sebelumnya Indonesia masih menganut sistem pemerintahan sentralistik. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat lebih leluasa dalam menentukan arah pembangunan daerahnya dan sesuai dengan potensi serta kondisi yang berkembang di masyarakat. Menurut Waluyo dalam Chandra (2017) dampak dari ketergantungan daerah terhadap pusat antara lain adalah tidak berkembangnya desentralisai keuangan daerah dan ketidakberdayaan masyarakat lokal untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah masih mengalami permasalahan dalam desentralisasi yang pada umumnya dikarenakan tidak cukupnya sumber daya keuangan daerah. Sehingga pemerintah daerah haruslah memiliki finansial yang mencukupi dan lebih bebas dalam mengelola keuangannya sendiri. Karena hakikat dari otonomi adalah adanya kewenangan daerah bukan pendelegasian Adi dalam Chandra (2017).

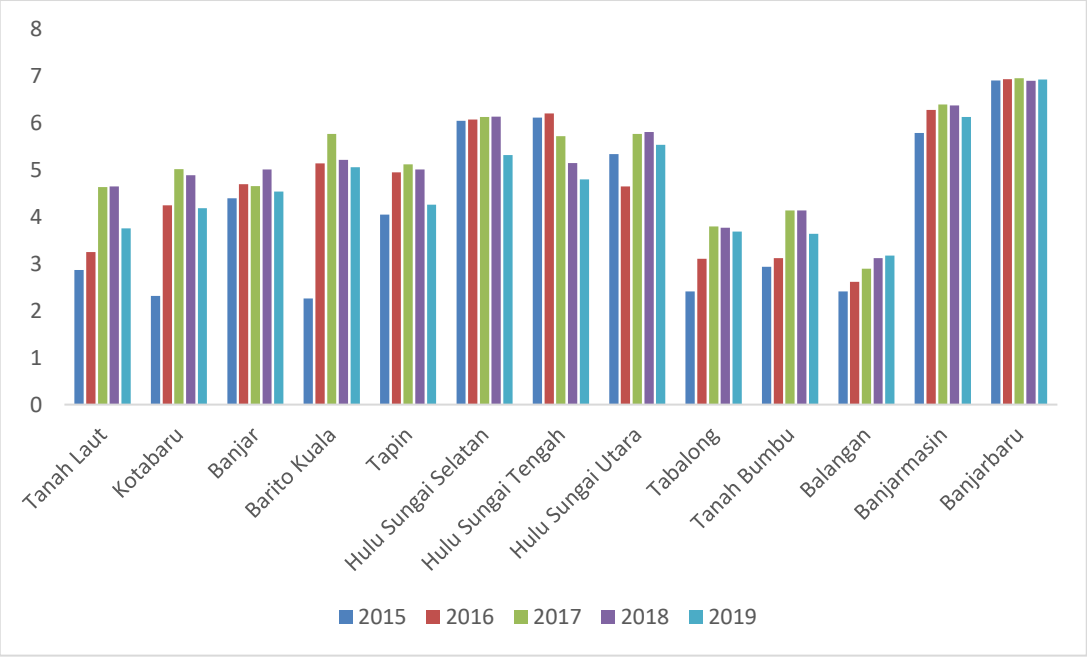

Laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik di atas laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami naik turun setiap tahunnya. Kabupaten dengan laju

pertumbuhan yang cukup meningkat selama lima tahun tersebut adalah kabupaten Balangan, dimana peningkatannya 2.8% namun masih menjadi kabupaten dengan laju pertumbuhan terendah. Dan laju pertumbuhan tertinggi diraih oleh Kota Banjarbaru dengan mencapai 6.9%.

Tabel 1 Dana Perimbangan Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
2015	1.576.111.339	940.976.170.450	571.244.699.000	63.890.470.000
2016	2.677.349.255	1.044.507.972	779.517.454.000	853.323.829.000
2017	2.712.223.930	635.201.530.500	1.106.532.187	970.490.213.144
2018	2.986.689.751	932.678.930.168	1.118.213.289	935.797.532.495
2019	3.145.120.773	845.973.766.124	1.188.146.871	1.111.000.136

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

Dana perimbangan untuk provinsi Kalimantan selatan memiliki nilai yang besar dan meningkat, yang mana mengindikasikan terjadinya realisasi untuk dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang besar dan seharusnya terjadi pertumbuhan ekonomi, dilihat juga dari data pertumbuhan ekonomi pada gambar 1 yang rata-rata tiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah mengalami pertumbuhan ekonomi meski tidak selalu naik. Sehingga ada dugaan dengan dana perimbangan tertentu mampu membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2 *Gini Ratio* Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2011	2015	2019
Tanah Laut	0,32	0,27	0,232
Kotabaru	0,33	0,34	0,33
Banjar	0,35	0,32	0,35
Barito Kuala	0,32	0,36	0,32
Tapin	0,25	0,34	0,25
Hulu Sungai Selatan	0,34	0,31	0,34
Hulu Sungai Tengah	0,29	0,32	0,29
Hulu Sungai Utara	0,28	0,35	0,28
Tabalong	0,34	0,28	0,34
Tanah Bumbu	0,34	0,33	0,34
Balangan	0,30	0,40	0,30
Banjarmasin	0,38	0,38	0,38
Banjarbaru	0,33	0,35	0,33

Sumber: BPS Kalimantan Selatan

Berdasarkan Tabel 2, kesenjangan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih mengalami naik turun. Kemajuan akan terjadi jika kesenjangan ekonoinya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kesenjangan ekonomi yang menurun menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada aktivitas ekonomi. Hal ini membuat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pengurangan ketimpangan pendapatan. Dari data tersebut ada dugaan bahwa terjadi ketimpangan pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga diharapkan dengan jumlah dana alokasi umum yang tinggi dapat menjadi salah satu pendorong menurunnya ketimpangan ekonomi daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan ialah salah satu sumber pendapatan yang diperuntukkan bagi daerah, berasal dari APBN guna mendukung terlaksananya kewenangan pemerintah daerah demi mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik (Widjaja, 2002).

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang sumbernya dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah berdasar angka presentase guna mendanai kebutuhan pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah (otonom) dan memperhatikan potensi daerah penghasil (Kementerian Keuangan, 2017).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah yang rsumbernya dari APBD. Dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah demi terlaksananya desentralisasi serta pemerataan keuangan antar daerah (Kemenkeu Learning Center, 2019).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar ataukah lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi atau tidak perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga pada dasarnya terkait dengan meningkatnya produksi barang dan jasa pada suatu perekonomian (Sadono Sukirno, 1985).

Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah

Dengan pertumbuhan ekonomi secara langsung atau tidak langsung akan memberi pengaruh kepada masalah ketimpangan regional. Menurut Mudrajat Kuncoro (2004) ketimpangan dalam pembagian pendapatan merupakan ketimpangan pada perkembangan ekonomi antar daerah dalam suatu wilayah yang akan menyebabkan pula terjadinya ketimpangan tingkat pendapatan per kapita antar daerah.

Tipologi Klassen

Tipologi Klassen peneliti gunakan untuk mengetahui gambaran, pola atau struktur pertumbuhan perekonomian masing-masing daerah. Pada dasarnya Tipologi Klassen membagi daerah menjadi empat klasifikasi. Dalam penelitian ini peneliti membagi keempat klasifikasi tersebut dalam tiga perbandingan yaitu, (1) dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi (2) dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi; (3) dana alokasi umum dan kesenjangan ekonomi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Prabawa (2015) berjudul Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil selama tahun 2003-2013, disparitas pembangunan ekonomi Wilayah Pantai Timur dilihat dari hasil perhitungan menggunakan Indeks Williamson, adanya enam wilayah yang disparitasnya kian meningkat dan juga terdapat enam wilayah yang disparitasnya kian menurun. Untuk hasil menggunakan analisis Tipologi Klassen di Wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara menunjukkan ada satu daerah yang termasuk kategori cepat maju dan cepat tumbuh, tiga daerah yang termasuk kategori wilayah maju tapi tertekan, empat wilayah termasuk kategori sedang tumbuh/berkembang, dan empat wilayah yang termasuk kategori wilayah tertinggal/tertekan.

Madina (2020) dengan penelitian berjudul Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Regional di Kalimantan (Pendekatan *Shift Share*) untuk meganalisis pengaruh *regional share, proportional shift*, dan *competitive shift* terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Analisis Tipologi Klassen yang hasilnya adalah bahwa tidak pada semua provinsi mengalami pertumbuhan yang positif tiap tahunnya, sedangkan untuk hasil analisis regresi data panel yang

hasilnya bahwa *regional shift* memberi pengaruh (mempengaruhi) ketimpangan pembangunan pada regional Kalimantan.

Penelitian Bemby (2015) berjudul Analisis Tipologi Klassen dan Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui dinamika pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Tipologi Klassen dan korelasi *rank*, dengan hasil jika Tipologi Klassen menunjukkan (1) wilayah yang termasuk kategori dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi; (2) wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan IPM rendah; (3) wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonominya rendah dan IPM yang tinggi; (4) wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan IPM yang rendah. Untuk hasil matematika perhitungan menunjukkan peran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tidak didukung untuk mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonominya yang ditunjukkan dengan nilai r = 0,600 atau sama dengan 60%. Dengan rendahnya peran SDM pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan masih rendah pula niat pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan dana perimbangan dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi serta peranan dana alokasi umum dan kesenjangan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2011-2019. Yang pada penelitian ini peneliti menganalisis berdasarkan pada tiga tahun perbandingan, yaitu tahun 2011 sebagai tahun dasar pengamatan, tahun 2015 sebagai tahun tengah pengamatan dan tahun 2019 sebagai tahun akhir pengamatan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menjelaskan peranan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum terhadap kesenjangan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN didapat oleh daerah dari tranfer pemerintah pusat untuk mendorong terlaksananya kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi serta untuk mencapai keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu demi mendanai kebutuhan daerahnya dalam melaksanakan desentralisasi. Dana bagi hasil sendiri sumbernya dari pajak dan sumber daya alam, dengan ini mampu menjadi salah satu faktor penunjang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah juga demi mengoptimalkan sumber-sumber asli daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Dana alokasi umum ini sumbernya dari penerimaan pajak dan subsidi negara.

Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi adalah ketidakmerataan pendapatan maupun ketidakmampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang ada pada daerahnya sehingga mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya. Kesenjangan ekonomi dalam penelitian ini di*proxy* dengan

Gini Ratio yang merupakan koefisien untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan yang terjadi pada suatu wilayah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari indikator penting untuk menilai kinerja perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan tambahan pendapatan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku literatur, jurnal serta karya ilmiah, juga dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Teknik Analisis Data

Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran pola atau struktur pertumbuhan perekonomian masing-masing daerah. Pada dasarnya Tipologi Klassen membagi daerah menjadi empat klasifikasi. Dalam penelitian ini peneliti membagi keempat klasifikasi tersebut dalam tiga perbandingan yaitu, (1) dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi; (2) dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi; (3) dana alokasi umum dan kesenjangan ekonomi.

Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi

Kuadran I dengan kriteria dana perimbangan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, kuadran II dana perimbangan rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi, kuadran III dana perimbangan tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah dan kuadran IV dana perimbangan rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah. Dengan kuadran II sebagai tujuan kuadran terbaik.

Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi

Kuadran I dengan kriteria dana bagi hasil yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, kuadran II dana bagi hasil rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi, kuadran III dana bagi hasil tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah dan kuadran IV dana bagi hasil rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah. Dengan kuadran I sebagai tujuan kuadran terbaik.

Dana Alokasi Umum dan Kesenjangan Ekonomi

Kuadran I dengan kriteria dana alokasi umum yang tinggi dan kesenjangan ekonomi yang tinggi, kuadran II dana alokasi umum rendah dan kesenjangan ekonomi tinggi, kuadran III dana alokasi umum tinggi dan kesenjangan ekonomi rendah dan kuadran IV dana alokasi umum rendah dan kesenjangan ekonomi rendah. Dengan kuadran III sebagai tujuan kuadran terbaik.

HASIL DAN ANALISIS

Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi

Tipologi Klassen perkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan melalui dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi dalam waktu 2011, 2015 dan 2019. Dilakukan demikian agar dapat melihat struktur ataupun perubahan berdasarkan pengelompokkan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Tipologi Klassen pada 2011 ini menggunakan batas acuan rata-rata dana perimbangan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 549.543.292.090 dan rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 6,51%. Pada 2015 ini menggunakan batas acuan untuk rata-rata dana perimbangan adalah Rp 862.289.777.043 dan rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 4,14%. Dan pada 2019 menggunakan batas acuan untuk rata-rata dana perimbangan adalah Rp 1.089.423.013.066 dan rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 4,70%.

Tabel 1 Hasil Kuadran *Scatter Plot* Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2015	2019	KETERANGAN
1.	Banjarmasin	III	II	III	Daerah Menurun
2.	Banjarbaru	IV	II	III	Daerah Menurun
3.	Banjar	I	I	II	Daerah Membaik
4.	Balangan	II	IV	II	Daerah Membaik
5.	Barito Kuala	IV	III	III	Daerah Menurun
6.	Tapin	II	III	IV	Daerah Menurun
7.	Kotabaru	III	III	II	Daerah Membaik
8.	Tanah Bumbu	I	III	II	Daerah Membaik
9.	Tanah Laut	I	III	II	Daerah Membaik
10.	Hulu Sungai Selatan	IV	II	III	Daerah Menurun
11.	Hulu Sungai Tengah	IV	II	III	Daerah Menurun
12.	Hulu Sungai Utara	IV	II	III	Daerah Menurun
13.	Tabalong	I	III	II	Daerah Membaik

Sumber: Penulis 2021

Ket. : I = Dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi tinggi
II = Dana perimbanagan rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi
III = Dana perimbangan tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah
IV = Dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi rendah

Pada penelitian ini daerah yang baik adalah yang memiliki kriteria pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan dana perimbangan yang rendah atau berada pada kuadran II. Pada tahun 2011. Daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun perbandingan adalah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Dan Hulu Sungai Utara. Daerah yang pertumbuhan ekonominya membaik adalah Kabupaten Banjar, Balangan, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tabalong.

Tipologi Klassen Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi

Tipologi Klassen per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan melalui dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi dalam waktu 2011, 2015 dan 2019. Dilakukan demikian agar dapat melihat struktur ataupun perubahan berdasarkan pengelompokkan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Tipologi Klassen pada 2011 ini menggunakan batas acuan untuk rata-rata dana bagi hasil adalah Rp 189.719.656.843 dan rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 6,51%. Pada 2015 ini menggunakan batas acuan untuk rata-rata dana bagi hasil adalah Rp 274.138.066.889 dan rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 4,14%. Dan pada 2019 menggunakan batas acuan untuk rata-rata dana bagi hasil adalah Rp 342.219.869.174 dan rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 4,70%.

Tabel 2 Hasil Kuadran *Scatter Plot* Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2015	2019	KETERANGAN
1.	Banjarmasin	IV	II	II	Daerah Menurun
2.	Banjarbaru	IV	II	II	Daerah Menurun
3.	Banjar	I	I	IV	Daerah Menurun
4.	Balangan	I	III	III	Daerah Menurun
5.	Barito Kuala	IV	IV	II	Daerah Membaik
6.	Tapin	II	III	III	Daerah Menurun
7.	Kotabaru	III	III	IV	Daerah Menurun
8.	Tanah Bumbu	I	III	III	Daerah Menurun
9.	Tanah Laut	I	III	III	Daerah Menurun
10.	Hulu Sungai Selatan	IV	II	II	Daerah Membaik
11.	Hulu Sungai Tengah	IV	II	II	Daerah Membaik
12.	Hulu Sungai Utara	IV	II	II	Daerah Membaik
13.	Tabalong	I	III	III	Daerah Menurun

Sumber: Penulis 2021

Ket. : I = Dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi tinggi

II = Dana bagi hasil rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi
III = Dana bagi hasil tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah
IV = Dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi rendah

Untuk penelitian ini daerah yang baik adalah yang memiliki kriteria pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan dana bagi hasil yang juga tinggi atau berada dikuadran I. Daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tiga tahun perbandingan adalah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Balangan, Tapin, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tabalong. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi membaik selama tiga tahun perbandingan adalah Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara.

Tipologi Klassen Dana Alokasi Umum dan Kesenjangan Ekonomi

Tipologi Klassen perkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan melalui dana alokasi umum dan kesenjangan ekonomi yang diproksi dengan *Gini Ratio* dalam waktu 2011, 2015 dan 2019. Dilakukan demikian agar dapat melihat struktur ataupun perubahan berdasarkan pengelompokkan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Tipologi Klassen pada 2011 ini menggunakan batas acuan untuk rata-rata dana alokasi umum adalah Rp 338.871.251.295 dan rata-rata *Gini Ratio* adalah 0,32%. Pada 2015 ini menggunakan batas acuan untuk rata-rata dana alokasi umum adalah Rp 486.256.159.692 dan rata-rata *Gini Ratio* adalah 0,33%. Dan pada 2019 ini menggunakan batas acuan untuk rata-rata dana alokasi umum adalah Rp 552.414.508 dan rata-rata *Gini Ratio* adalah 0,32%.

Hasil Kuadran *Scatter Plot* Dana Alokasi Umum dan Kesenjangan Ekonomi

NO	KABUPATEN/KOTA	2011	2015	2019	KETERANGAN
1.	Banjarmasin	I	I	I	Daerah Tetap
2.	Banjarbaru	II	II	II	Daerah Meningkat
3.	Banjar	I	III	I	Daerah Meningkat
4.	Balangan	IV	II	IV	Daerah Menurun
5.	Barito Kuala	III	I	III	Daerah Menurun
6.	Tapin	IV	II	IV	Daerah Menurun
7.	Kotabaru	I	I	I	Daerah Tetap
8.	Tanah bumbu	II	IV	II	Daerah Meningkat
9.	Tanah Laut	III	IV	III	Daerah Menurun
10.	Hulu Sungai Selatan	II	IV	II	Daerah Meningkat
11.	Hulu Sungai Tengah	III	IV	IV	Daerah Menurun
12.	Hulu Sungai Utara	IV	II	IV	Daerah Menurun
13.	Tabalong	II	IV	II	Daerah Meningkat

Sumber: Penulis 2021

Ket. : I = Dana alokasi umum dan Kesenjangan ekonomi tinggi
II = Dana alokasi umum dan Kesenjangan ekonomi tinggi
III = Dana alokasi umum tinggi dan Kesenjangan ekonomi rendah
IV = Dana alokasi umum dan Kesenjangan ekonomi rendah

Pada penelitian ini daerah yang baik adalah yang memiliki kriteria dana alokasi umum yang tinggi kesenjangan ekonomi yang rendah atau berada pada kuadran III. Daerah yang mengalami peningkatan kesenjangan ekonomi dalam tiga tahun perbandingan adalah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Daerah dengan kesenjangan ekonomi tetap adalah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru. Daerah dengan kesenjangan ekonomi yang menurun adalah Kabupaten Balangan, Barito Kuala, Tapin, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu sungai Utara.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Hasil analisis peranan dana perimbangan terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mendeskripsikan bahwa meski memiliki dana

perimbangan yang rendah tidak menjamin tidak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi, namun dengan dana bagi hasil yang tinggi lebih membantu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, dan dengan dana perimbangan yang tinggi dapat menunjang untuk mengurangi kesenjangan daerah. Meski begitu masih banyak daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang pertumbuhan dan kesenjangannya tidak stabil pada tiga tahun perbandingan 2011, 2015 dan 2019.

Secara keseluruhan kabupaten Balangan pertumbuhan ekonominya meningkat, namun kabupaten ini masih menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang terendah dibanding daerah lainnya. Daerah dengan sumber daya tinggi serta memiliki sektor unggulan berupa pertambangan dan penggalian rata-rata lebih memiliki pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata provinsi dibanding dengan daerah yang mengandalkan sektor non pertambangan yang rata-ratanya dibawah provinsi. Namun hal ini tetap tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya kesenjangan pada daerah yang tidak mengunggulkan sektor pertambangan dan penggalian. Seperti kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara, mereka berada pada kuadran II pada tahun 2015 dan 2019, yang berarti terjadi pertumbuhan ekonomi meski daerah-daerah tersebut tidak mengunggulkan sektor pertambangan dan penggalian.

Dilihat dari hasil ini masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya, sehingga untuk itu diperlukan upaya dalam mempertahankan pertumbuhan ekononomiya. Harusnya pemerintah daerah dapat menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktifitas serta nilai tambah dan terus mengembangkan potensi daerah juga mempertahankannya demi terus tercipta pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antar daerah.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan referensi penelitian serupa, penelitian terdahulu cenderung menggunakan analisis regresi, dalam penelitian ini terjadi perubahan metode penelitian sehingga penulis menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk mengetahui peranan dana perimbangan terhadap pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, dalam penelitian ini data yang digunakan berdasarkan periode analisis yang hanya membandingkan tiga tahun yaitu 2011, 2015 dan 2019, sehingga penelitian ini terbatas hanya pada keadaan ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun tersebut.

Kesimpulan

Analisis Tipologi Klassen untuk mengetahui peranan dana perimbangan dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena beberapa hal salah satunya sumbangan dana perimbangan, namun pembangunan ekonomi tetap dapat bertumbuh meskipun sumbangan dana perimbangan relatif kecil. Namun untuk dana bagi hasil yang tinggi dengan semakin banyak potensi daerah dan sumber daya alamnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Peranan dana alokasi umum terhadap kesenjangan ekonomi daerah akan baik apabila dana alokasi umum tinggi, karena hal ini membantu memicu terjadinya penurunan kesenjangan ekonomi dengan realisasi untuk kebutuhan umum daerah.

Kriteria Tipologi Klassen yang lebih baik berdasarkan perbandingan dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi adalah berada dikuadran II, dimana dana perimbangan yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daerah-daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun perbandingan yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Dan Hulu Sungai Utara, kebanyakan mengalami penurunannya pada tahun 2011 dan 2019 dengan berada pada kuadran III dan IV. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi membaik yaitu Kabupaten Banjar, Balangan, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tabalong, dengan banyak berada pada kuadran II

baik pada 2011, 2015 dan 2019. Meskipun begitu dilihat dari datanya daerah yang menurun harus dapat berada pada kuadran yang lebih baik yaitu kuadran II.

Kriteria Tipologi Klassen yang lebih baik berdasarkan perbandingan dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi adalah berada dikuadran I, dimana dana bagi hasil yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun selama tiga tahun perbandingan adalah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Balangan, Tapin, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tabalong yang kebanyakan berada pada kuadran IV ditahun 2011 dan 2015. Sedangkan daerah dengan pertumbuhan ekonomi membaik selama tiga tahun perbandingan adalah Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu daerah dengan dana bagi hasil yang lebih tinggi dapat lebih membantu terjadinya partumbuhan ekonomi daerahnya. Sehingga penting bagi daerah yang masih mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi untuk dapat berada dikuadran I.

Kriteria Tipologi Klassen yang lebih baik berdasarkan perbandingan dana alokasi umum dan kesenjangan ekonomi adalah pada kuadran III dimana dana alokasi umum lebih besar daripada kesenjangan ekonomi. Daerah-daerah yang mengalami peningkatan kesenjangan ekonomi adalah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong, yang mana masih banyak berada pada kuadram IV dalam tiga tahun pengamatan. Sedangkan daerah yang kesenjangan ekonomi yang menurun adalah Kabupaten Balangan, Barito Kuala, Tapin, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu sungai Utara. Dan daerah dengan kesenjangan ekonomi tetap adalah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru. Dengan memiliki dana alokasi umum yang tinggi dapat membantu daerah dalam mengurangi kesenjangan daerahnya, berdasarkan hasil tersebut daerah yang masih memiliki kesenjangan ekonomi yang tinggi harus dapat berada dikuadran III.

BIBLIOGRAPHY

Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*.

Kemenkeu Learning Center. (2019). *Dana Bagi Hasil*. Kemenkeu Republik Indonesia. https://klc.kemenkeu.go.id/dana-alokasi-umum/

Kementerian Keuangan. (2017). *Dana Bagi Hasil: Tujuan, Prinsip, dan Jenis*. Djpk Republik Indonesia. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726

Mudrajat Kuncoro. (2004). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijaksanaan*. Erlangga.

Sadono Sukirno. (1985). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijaksanaan*.

Utara, P. S. (2015). *Anggie derry prabawa 137003007*.

Widjaja, H. A. . (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. PT.Raja Grafindo Persada.